

KONDISI SOSIO-AGRARIA LAHAN SAWAH DI KOTA SUKABUMI

Socio-agrarian Conditions of Paddy Field in Sukabumi City

Yuda Hidayat Mansur*), Endriatmo Soetarto dan Komarsa Gandasasmita

Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB
Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB

*Email: yhm_27@yahoo.com

Diterima 28 November 2014/Disetujui 30 Desember 2014

ABSTRACT

Paddy field, the paddy planted area, is a very important land since it produces staple food – rice. Nevertheless, the contradictory condition occurs when agricultural land converted into non-agricultural land. Agricultural land that is not protected is prone to the land conversion, especially in urban areas or the growing city. The study aimed to figure out the strategies for protecting paddy field by identifying the spatial pattern of social quality of paddy field farmers. The research methodology used mixed concurrent method by using qualitative and quantitative data and it was analyzed by cluster analysis. The research analysis used cluster analysis in order to show the farmer similarity characteristics of each sub-districts. The results showed, the farmers's social relations group is formed of six types community, namely : (1) the farmer owners, (2) the farmers owner also tenant, (3) the farmer owners concurrent collector (middlemen), (4) peasant (5) peasant also farm laborer, and (6) a laborer. Labor, farmers regeneration, and land tenure fragmentation influenced to land use change. The strategies can be implemented to protect sawah in Sukabumi, namely: (1) by increasing the farmer's agribusiness capacity, (2) Formulating the action plan for regenerating young farmers, (3) by controlling the permission regarded to change of land use, (4) Sukabumi municipal buys the productive ricefields. For further, It seem should be conducted assessment on studying of the study on the Agropolis and Agroedutourism concept in Sukabumi.

Keyword: farmer community, paddy field protection strategy, social quality, sosio-agrarian

ABSTRAK

Sawah, luas tanaman padi, adalah tanah yang sangat penting karena menghasilkan makanan pokok - beras. Namun demikian, kondisi yang kontradiktif terjadi ketika lahan pertanian dikonversi menjadi lahan non-pertanian. Lahan pertanian yang tidak dilindungi dapat beralih fungsi untuk konversi lahan, terutama di daerah perkotaan atau kota berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi untuk melindungi sawah dengan mengidentifikasi pola spasial kualitas sosial petani sawah. metodologi penelitian yang digunakan metode concurrent campuran dengan menggunakan data kualitatif dan kuantitatif dan dianalisis dengan analisis kluster. Analisis penelitian yang digunakan kluster analisis untuk menunjukkan karakteristik kesamaan petani masing-masing kecamatan. Hasil penelitian menunjukkan, kelompok hubungan sosial petani yang terbentuk dari enam jenis masyarakat, yaitu: (1) petani pemilik, (2) petani pemilik juga penyewa, (3) pemilik petani kolektor bersamaan (perantara), (4) petani (5) petani juga buruh tani, dan (6) buruh. Buruh, petani regenerasi, dan kepemilikan lahan fragmentasi dipengaruhi mendarat perubahan penggunaan. Strategi dapat diimplementasikan untuk melindungi sawah di Sukabumi, yaitu: (1) peningkatan kapasitas agribisnis petani, (2) Merumuskan rencana aksi untuk regenerasi petani muda, (3) dengan mengendalikan izin dianggap untuk mengubah penggunaan lahan, (4) kota Sukabumi membeli sawah produktif. Untuk lebih lanjut, harus dilakukan penelitian studi pada konsep Agropolis dan Agroedutourism di Sukabumi.

Kata Kunci: kualitas sosial, masyarakat petani, sosio-agraria, strategi perlindungan sawah

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendekatan pembangunan selama ini mengedepankan pada pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dengan mengesampingkan faktor-faktor sosial dan hal yang mendasar. Wiradi (2000) menyatakan

bahwa pembangunan ala Orde Baru menganut paradigma modernisasi. Paradigma modernisasi bertumpu pada pandangan bahwa secara global, pembangunan itu terdiri dari empat proses, yaitu: (1) penanaman modal untuk meningkatkan produktivitas, (2) proses alih teknologi dari negara maju ke negara berkembang dalam rangka penerapan iptek bagi kegiatan produksi dan jasa, (3) proses munculnya negara-negara, dan organisasi-organisasi

politik dan ekonomi skala besar, dan (4) proses urbanisasi (Wiradi, 2000).

Salah satu sumber daya lahan yang kian menipis dan langka di antaranya lahan pertanian sawah. Sawah menjadi sangat penting karena lahan ini menjadi media tanam padi. Padi akan menjadi salah satu komoditi pertanian terpenting dalam kehidupan manusia. Namun demikian, kondisi yang kontradiktif terjadi ketika konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian seperti permukiman, industri atau fungsi lahan lainnya menjadi gerakan yang sangat masif ketika kelayakan ekonomi menjadi dasar pertimbangan tata guna lahan. Alih fungsi lahan ini cukup mengkhawatirkan sehingga pemerintah memandang perlu untuk mengatur dan melindungi lahan pertanian khususnya lahan pertanian pangan. Lahan pertanian yang tidak terlindungi akan rentan untuk beralih fungsi, terutama di wilayah perkotaan, atau kota yang sedang berkembang. Rustiadi dan Wafda (2005) berpendapat bahwa pada daerah-daerah seputar perkotaan ekspansi aktivitas urban (suburbanisasi) merupakan faktor utama terjadi alih fungsi lahan-lahan pertanian ke aktivitas urban. Sebagian besar magnitude proses alih fungsi lahan berlangsung di kawasan perdesaan, khususnya pada kawasan-kawasan perbatasan kota-desa dan perbatasan kawasan budidaya-nonbudidaya.

Berdasarkan data Kota Sukabumi dalam Angka Tahun 2007–2013, terjadi penurunan lahan Sawah di Kota Sukabumi dengan laju perubahan antara 2006-2012 sebesar 31.39%. Luas lahan sawah di Kota Sukabumi yang mencapai 1,589 Ha atau 33.10% dari Luas Kota Sukabumi menjadi potensi tersendiri bagi Kota Sukabumi. BPS Provinsi Jawa Barat mencatat bahwa Kota Sukabumi merupakan kabupaten/kota yang memiliki tingkat produktivitas padi tertinggi se-Jawa Barat. Akibat dari penurunan luas lahan sawah di Kota Sukabumi, telah terjadi penurunan rata-rata Hasil Produksi Padi Sawah pada tahun 2012 hanya mencapai 67.49 kw/ha dari 76.72 kw/ha pada tahun 2008. Dugaan sementara, bahwa berkurangnya produktivitas padi tersebut diakibatkan terkonversinya lahan-lahan produktif di wilayah Kota Sukabumi, sedangkan lahan sawah yang masih tersisa merupakan lahan dengan produktivitas di bawah lahan sawah yang terkonversi. Dengan semakin menurunnya produktivitas padi mengakibatkan penurunan hasil produksi padi sawah per tahun yang hanya mencapai 22979.27 ton. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan pada lima tahun terakhir yang mencapai 28012.94 ton.

Berdasarkan Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013, di Kota Sukabumi rata-rata luas lahan sawah yang dikuasai hanya mencapai 2353.31 m² atau sekitar 0.235 ha. Luas tersebut berarti masih termasuk kategori luas garapan lahan pertanian petani gurem. BPS Kota Sukabumi (2013) mencatat besaran petani gurem mencapai 4521 rumah tangga dari 5586 rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang ada atau mencapai 81%. Selain itu, jumlah petani utama yang berusia 45 tahun ke atas mencapai 81.5%. Kondisi ini menandakan bahwa sektor pertanian di daerah perkotaan tidak menjadi mata pencaharian utama bagi generasi muda.

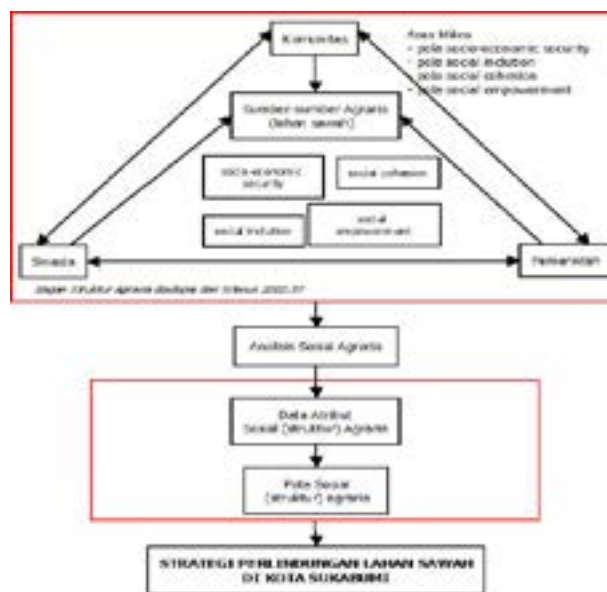
Permasalahan lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kota Sukabumi terjadi dengan ditandai oleh tingginya alih fungsi atau berkurangnya lahan sawah, kepemilikan/penguasaan lahan sawah yang relatif sempit oleh petani dan kemungkinan tingginya kepemilikan lahan pertanian oleh selain orang Kota Sukabumi (absentee). Dengan

demikian, perlu diuraikan kondisi sosial agraria pada lahan sawah untuk membangun strategi perlindungan lahan agar terbangun sistem yang efektif untuk membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan sawah.

Kerangka Pemikiran

Perlindungan lahan sawah sebagai lahan pertanian berkelanjutan tentunya harus dilakukan langkah strategis. Sebuah strategi dibangun dengan beberapa pendekatan, baik itu pendekatan fisik, ekonomi maupun sosial. Penelitian ini bertujuan akhir untuk membangun strategi perlindungan dengan pendekatan sosiologi agraria dengan mengidentifikasi dan memetakan struktur agraria yang berlaku pada lahan sawah lokasi penelitian. Pendekatan ini akan cukup efektif karena akan melihat pada aras makro, aras meso dan aras mikro serta pola relasi yang terjadi pemilihan, penguasaan, pemanfaatan dan penggunaan lahan. Sumaryanto (2005:24) berpendapat bahwa pola konversi lahan sawah dapat terjadi dengan diawali alih fungsi penguasaan. Pemilik menjual kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya untuk usaha nonsawah atau kepada makelar. Oleh karena itu, konversi lahan tidak akan terlepas dari subjek agraria, baik pemanfaat lahan sawah maupun peran pemerintah yang membuat regulasi pengaturan sebuah kawasan dan regulasi keagrariaan. Selain itu, peran dan relasi antarsubjek agraria serta relasi antara subyek agraria dengan obyek agraria menjadi kajian dalam penelitian ini.

Pemetaan sosial agraria sebagai upaya untuk memetakan kondisi sosial agraria pada lahan sawah di Kota Sukabumi akan diukur berdasarkan preferensi subyek agraria dengan pendekatan Social Quality yang meliputi 4 aspek yaitu: (1) Socio-economic security, (2) Social Cohesion, (3) Social Inclusion, dan (4) Social Empowerment. Hasil pemetaan sosial agraria digunakan untuk membangun strategi perlindungan lahan sawah agar tidak terkonversi dan tetap menjadi lahan abadi dan diharapkan terwujud keadilan agraria untuk mencapai kesejahteraan petani dan warga yang termarginalisasikan.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Strategi Penelitian

Strategi penelitian ini menggunakan mixed method dengan cara menggabungkan metode penelitian kuantitatif dengan metode penelitian kualitatif. Menurut Jick dan Creswell, Creswell dan Palno Clark (2007) dalam Creswell (2010) bahwa mixed method adalah suatu metode dalam mencari konvergensi antara metode kualitatif dan metode kuantitatif yang bisa digunakan secara berdampingan untuk memperkuat satu sama lain. Secara khusus, strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran konkuren/satu waktu (concurrent mixed method), yakni prosedur-prosedur di mana di dalamnya peneliti mempertemukan atau menyatukan data kuantitatif dan kualitatif untuk memperoleh analisis komprehensif atas masalah penelitian (Creswell, 2010). Pencampuran dilakukan pada tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap interpretasi data. Sebagaimana hal dengan teknik pengumpulan data, maka analisis data menggunakan strategi triangulasi konkuren.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di 7 Kecamatan di wilayah Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat dengan luas wilayah 4846.993 ha (empat ribu delapan ratus empat puluh enam koma sembilan ratus sembilan sembilan tiga hektar) yang terletak pada koordinat 106°52'12,23" BT-106°57'36,32" BT dan 6°53'32,69" LS-6°58'44,32" LS. Penelitian ini dilaksanakan selama 7 bulan, yaitu dari bulan April sampai dengan bulan Oktober 2014

Jenis Data

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat up to date. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner. Data Primer diperoleh melalui kuesioner, dan wawancara dengan para informan, partisipan dan stakeholders.

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain. Data yang digunakan berupa Data Kualitatif dan Data Kuantitatif.

Teknik Pengumpulan Data

Observasi Kualitatif dan Kuantitatif, peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini dilakukan baik secara terstruktur dengan menggunakan alat observasi berupa angket/kuesioner atau semiterstruktur dengan mengajukan sejumlah pertanyaan. Wawancara, peneliti melakukan dengan face to face interview dengan partisipan. Wawancara ini dilakukan secara semiterstruktur bahkan tidak terstruktur dan dilakukan pertanyaan bersifat terbuka untuk memunculkan pandangan dan opini dari para informan/partisipan.

Studi Dokumen, pengumpulan data melalui dokumen-dokumen berupa dokumen publik (seperti koran, majalah,

makalah, laporan-laporan) serta dokumen privat (buku harian, surat atau yang lainnya) Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi kualitatif dan kuantitatif, wawancara dan studi dokumen. Pemilihan sampel dilakukan secara sengaja (purposive sampling) dengan jumlah sebanyak 18 orang yang diperoleh dengan tehnik snow balling.

Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu analisis data kuantitatif, analisis data kualitatif dan metode pencampuran konkuren.

Analisis Data Kuantitatif

Cluster Analysis

Cluster Analysis atau analisis gerombol digunakan untuk mengelompokkan obyek yang memiliki kesamaan atau jarak ketidaksamaan. Unit-unit analisis yang dikelompokkan akan bergerombol sesuai dengan kedekatan/kemiripan karakteristiknya masing-masing dengan menggunakan K-Mean Cluster. Dalam penelitian ini, analisis klaster bertujuan mengelompokkan petani berdasarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat kualitas sosial. Pengelompokan petani menjadi beberapa kelompok didasarkan pada pengukuran variabel-variabel yang diamati, sehingga diperoleh kemiripan kebutuhan dalam kelompok yang sama untuk penyusunan strategi perlindungan lahan.

Ukuran jarak yang sering digunakan adalah jarak euclidian (euclidean distance). Persamaan penghitungan jarak euclidian antara dua titik atau dua klaster atau gerombol adalah:

$$D = \left\{ \sum_{i=1}^p (X_i - Y_j)^2 \right\}^{1/2}$$

Nilai D merupakan jarak antara titik data/ gerombol X dan Y. Makin kecil nilai D makin besar kemiripan data X dan Y. Asumsi yang harus dipenuhi dalam penggunaan jarak euclidian ini adalah bahwa antar variabel tidak terjadi multicollinearity atau variabel-variabel yang ada saling tegak lurus (ortogonal). Berhubung pengkelasan sosial didasarkan pada karakteristik (variabel) dalam jumlah cukup besar, maka kemungkinan terjadinya multicollinearity cukup besar.

Pada tahap selanjutnya, dalam teknik penggerombolan, dilakukan amalgamasi antar gerombol sesuai dengan kedekatan jaraknya. Dalam penelitian ini digunakan metode Ward's. Penggabungan antara dua klaster atau gerombol data berdasarkan Metode Ward's dilakukan berdasarkan penghitungan jumlah kuadrat jarak dari kedua klaster hipotetis tersebut. Metode ini sangat efisien, namun demikian, umumnya metode ini cenderung membentuk ukuran gerombol yang kecil. Dalam penelitian ini, analisis klaster bertujuan mengelompokkan petani berdasarkan faktor-faktor utama yang mempengaruhi tingkat kualitas sosial. Pengelompokan petani menjadi beberapa kelompok didasarkan pada pengukuran variabel-variabel yang diamati, sehingga diperoleh kemiripan kebutuhan dalam kelompok yang sama untuk penyusunan strategi perlindungan lahan.

Analisis Data Kualitatif

Creswell (2010) mengilustrasikan analisis ini dengan pendekatan linier dan hirarkis yang dibangun dari bawah

ke atas dengan pendekatan interaktif karena beragam tahap saling berhubungan. Langkah-langkah analisis yang dilakukan sebagai berikut:

Langkah 1. Mengolah dan Mempersiapkan data yang akan dianalisis. Langkah ini menggunakan transkrip wawancara, scanning materi, mengetik data lapangan atau memilah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.

Langkah 2. Mencoba keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun general sense atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.

Langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan meng-coding data. Coding merupakan proses mengolah materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap: mengambil data tulisan yang telah dikumpulkan selama proses pengumpulan, mensegmentasi kalimat-kalimat atau pragraf-paragraf ke dalam kategori kemudian melabeli kategori dengan istilah-istilah khusus didasarkan pada istilah yang benar-benar berasal dari partisipan (in vivo).

Langkah 4. Terapkan proses coding untuk mendeskripsikan setting orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi, atau peristiwa-peristiwa dalam setting tertentu.

Langkah 5. Mendeskripsikan tema-tema dan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif. Pendekatan yang paling populer adalah dengan menerapkan pendekatan naratif dalam menyampaikan analisis dan memberikan informasi secara deskriptif tentang partisipan dalam sebuah model, Tabel dan peta.

Langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Interpretasi bisa makna yang berasal dari perbandingan antara hasil penelitian dengan informasi yang berasal dari literatur atau teori. Dalam hal ini peneliti bisa menegaskan apakah hasil penelitian membenarkan atau justru menyangkal informasi sebelumnya.

Reliabilitas, Validitas dan Generalisabilitas

Menurut Creswell (2010) bahwa dalam penelitian kualitatif, validitas tidak memiliki konotasi yang sama dengan validitas dalam penelitian kuantitatif tidak pula sejajar dengan reliabilitas ataupun dengan generalisabilitas dalam penelitian kuantitatif. Sebaliknya, validitas merupakan upaya pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan menerapkan prosedur-prosedur tertentu, sementara realibilitas mengindikasikan bahwa pendekatan yang digunakan peneliti konsisten jika diterapkan oleh peneliti-peneliti lainnya, sedangkan generalisabilitas bukan berarti untuk men-generalisasi hasil penemuan pada individu-individu, lokasi-lokasi atau tempat-tempat di luar objek penelitian sebagaimana yang banyak dijumpai pada penelitian kuantitatif. Generalisabilitas mirip dengan logika replikasi. Generalisasi muncul ketika mendapatkan kasus tambahan dan menggeneralisasi hasil penelitian sebelumnya pada kasus yang baru saja diteliti tersebut.

Temuan dan Pembahasan

Pola Spasial Socio-economic Security

Socio-economic security dalam pemetaan sosial ekonomi petani dapat dipahami dengan cara mengetahui tingkatan sumber daya yang dimiliki oleh petani dalam suatu wilayah kecamatan. Variabel yang digunakan untuk mengukur ini terdiri atas aspek fisik dan ekonomi yang bisa mendukung keberlanjutan petani secara sosial. Aspek ekonomis menggunakan variabel harga gabah rata-rata yang berlaku pada kecamatan tersebut, biaya yang dikeluarkan oleh petani dalam mengelola sawah dalam setiap hektar lahan dan akhirnya diukur pendapatan rata-rata petani per bulan. Selanjutnya aspek fisik yang diukur berkaitan dengan berapa jumlah pemilik lahan di kecamatan tersebut, jumlah penyakap, buruh tani yang diasumsikan sebagai petani tunakisma, luas penguasaan lahan, rata-rata luas lahan yang dimiliki, jumlah petani gurem yang penguasaannya kurang dari 0.5 hektar dan rata-rata indeks pertanaman lahan di suatu kecamatan. lampiran mengindikasikan bahwa klaster 1 adalah wilayah dengan tingkat socio-economic security yang memiliki peluang untuk dipertahankan lahan sawahnya, klaster 2 memiliki nilai rata-rata lebih rendah. Variabel yang perlu peningkatan pada klaster 1 yaitu harga gabah dan pendapatan perbulan. Peningkatan harga gabah dengan intervensi dari pemerintah atau dengan menyadari posisi tawar petani yang lebih besar akan berkorelasi dengan pendapatan perbulan petani. Demikian halnya dengan variabel yang seyogyanya rendah, pada posisi ini memiliki nilai rata-rata tinggi. Variabel dimaksud adalah jumlah buruh tani dan petani gurem. Kedua variabel ini memiliki kaitan yang erat. Reforma agraria menegaskan bahwa salah satu program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah adalah redistribusi lahan dan untuk mencapai minimal penguasaan lahan pertanian. Namun demikian, pihak Badan Pertanahan Nasioanl Kota Sukabumi menegaskan:

“.....di Kota Sukabumi redistribusi tidak dimungkinkan karena status tanah di kota Sukabumi sebagian besar tanah milik adat, tanah yang biasanya tanah didistribusikan itu biasanya tanah negara. Redis (redistribusi lahan) paling sesuai di daerah transmigran minimal 2 hektar, tapi kalo kita berbicara di pulau Jawa apa mungkin sekarang penerima redis 500 meter, apakah bisa sejahtera?, bagaimana terhadap akses lingkungannya? ada atau enggak? Jadi kalau di pulau Jawa itu nonsen, tidak akan berhasil, tapi kalo berbicara secara luas di Indonesia paling dengan transmigrasi”.

Berdasarkan informasi tersebut, kemungkinan untuk meningkatkan luas lahan garapan tidak dengan redistribusi lahan, karena kondisi status tanah dan lahan yang bisa didistribusikan tidak memadai.

Selanjutnya, pengelompokan dilakukan terhadap seluruh unit berdasarkan seluruh karakteristik yang diamati. Berdasarkan kenampakan hasil penggerombolan ditentukan pemotongan pada jarak antar gerombol yang terjauh sehingga mendapatkan gerombol. Selanjutnya, pengklasifikasian dilakukan berdasarkan jumlah yang diinginkan atau yang sudah diketahui berdasarkan analisis gerombol berhirarki untuk menentukan unit analisis yang dikelompokkan sesuai dengan kedekatan/kemiripan karakteristiknya masing-masing dengan menggunakan pendekatan metode K-Mean

Cluster.

Secara tipologi wilayah terdapat 2 pengelompokan kecamatan. Klaster 2 terdiri atas Kecamatan Cikole, Gunungpuyuh, Warudoyong, Citamiang dan Baros dengan nilai rata-rata 0.708. Klaster 1 terdiri dari Lembursitu dan Cibeureum dengan nilai rata-rata 0.742. Petani pada klaster 1 secara socio-economic security dimungkinkan untuk bisa mempertahankan lahan sawah. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa perpindahan klaster dari klaster 1 ke klaster 2. Hal ini tergantung pada perubahan kondisi socio-economic security pada masing-masing kecamatan baik secara fisik maupun ekonomi. Keunggulan pada klaster 1 yaitu dengan masih banyaknya tenaga kerja pertanian dan masih banyaknya lahan yang dimiliki dan dikuasai dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang termasuk pada klaster 1.

Petani Penguasaan Lahan yang Sempit dan Tunakisma

Relasi sosial pada masyarakat suburban akan dipengaruhi oleh peran para petani dalam penguasaan sumberdaya agraria, baik dengan kepemilikan lahan maupun penguasaan lahan dengan berbagai metode (sewa, bagi hasil atau lainnya). Makaya merupakan istilah yang banyak digunakan di kawasan ini untuk menunjukkan pola relasi agraria pemanfaatan dan penguasaan lahan pertanian. Pada kawasan suburban Kota Sukabumi makaya terlihat pada penggunaan lahan dan keberadaan kelompok sosial masyarakat dengan penguasaan sumberdaya agraria yang tidak sama. Struktur agraria yang dibangun melalui penguasaan perorangan, tidak semua warga komunitas dapat dengan mudah memperoleh akses untuk menguasai sumberdaya agraria. Enam komunitas petani menunjukkan struktur sosial pada petani di Kota Sukabumi dengan mekanisme makaya. Komunitas petani yang ada di Kota Sukabumi dapat dikategorikan sebagai berikut:

- Petani pemilik. Petani pada komunitas ini menguasai lahan hanya dengan pola kepemilikan tetap (baik petani pemilik yang lahannya digarap sendiri dan/atau petani pemilik yang lahannya digarap oleh orang lain),
- Petani pemilik juga penggarap. Petani pada komunitas ini menguasai lahan tidak hanya memiliki lahan tetapi juga mengusahakan lahan milik petani lain melalui makaya.
- Petani pemilik merangkap pengepul (tengkulak). Petani pada komunitas ini selain menguasai lahan juga melakukan usaha tani mengumpulkan hasil tani dari para petani lainnya.
- Petani penggarap. Petani pada komunitas ini menguasai lahan dengan cara mengusahakan lahan milik petani lain/bukan petani yang umumnya dengan sistem sewa. Petani penggarap ini pula termasuk para petani yang menggarap sawah kepada petani penggarap lainnya dengan pola makaya sistem sewa kepada penggarap yang lain.
- Petani penggarap juga buruh tani. Petani pada komunitas ini menguasai lahan dengan cara mengusahakan lahan milik petani lain/bukan petani melalui sistem sewa. Selain itu, untuk menambah penghasilan keluarga, mereka juga menjalankan peranan sebagai buruh tani.

- Buruh tani. Petani pada komunitas ini benar-benar tidak menguasai lahan, sehingga dapat dikategorikan sebagai tunakisma. Walaupun demikian, mereka masih memperoleh manfaat dari sumberdaya agraria dengan cara menjadi buruh tani.

Tabel 1. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian di Kota Sukabumi

Kecamatan	RTUP	RTUP	Buruh Tani	RTUP
	Pemilik	Penggarap		Penggarap ^{*)}
Baros	813	129	8	11
Lembursitu	1645	204	34	17
Cibeureum	903	481	49	17
Citamiang	303	33	0	0
Warudoyong	609	104	11	6
Gunungpuyuh	305	123	5	6
Cikole	295	96	6	6
Jumlah	4873	1170	113	63

*) Lapisan petani penggarap yang menyewa kepada penggarap lainnya

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2014 (diolah)

Tabel 2. Persentase Petani Gurem di Kota Sukabumi

Kecamatan	RTUP Pengguna	Petani Gurem	Persentase Petani
	Lahan		Gurem
Baros	913	774	84.78
Lembursitu	1723	1452	84.27
Cibeureum	1199	889	74.15
Citamiang	323	283	87.62
Warudoyong	690	503	72.9
Gunungpuyuh	383	312	81.46
Cikole	370	308	83.24
Jumlah	5,601	4,521	80.72

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2014 (diolah)

Tabel 3. Distribusi Rumah Tangga Petani Berdasarkan Luas Pemilikan

Golongan luas lahan (m ²)	Rumah Tangga Usaha Pertanian			
	2003	2013	Pertumbuhan	
			Absolut	%
<1000	6518	1352	-5166	-79.26%
1000-1999	1975	1404	-571	-28.91%
2000-4999	1596	1778	182	11.40%
5000-9999	535	718	183	34.21%
10000-19999	191	276	85	44.50%
20000-29999	58	38	-20	-34.48%
≥30000	28	35	7	25.00%
Jumlah	10,901	5,601	-5,300	-48.62%

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2014 (diolah)

Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2013 di Kota Sukabumi diperoleh besaran jumlah petani pada masing-masing lapisan sebagaimana terlihat pada Tabel 1. Tabel 1 mengungkap bahwa jumlah petani di Kota Sukabumi yang berstatus sebagai penggarap atau penyakap lebih kecil daripada petani pemilik penggarap. Sekalipun demikian, luas lahan garapan petani masih banyak pada kategori petani gurem sebagaimana terlihat pada Tabel 2. Hubungan agraria dapat dijelaskan bahwa satu rumah tangga memiliki dapat lebih dari satu kriteria, misalnya sebagai Pengelola Usaha Pertanian Pemilik dapat juga sekaligus sebagai penggarap.

Berdasarkan hasil Sensus pertanian 2013 diketahui dari berbagai lapisan tersebut mengenai penguasaan lahan di Kota Sukabumi sebagaimana terlihat pada Tabel 3. Tabel 3 memperlihatkan peningkatan persentase petani gurem dan berkurangnya jumlah rumah tangga pertanian dalam kurun waktu 10 tahun. Menanggapi berkurangnya jumlah rumah tangga pertanian dan regenerasi petani, Pimpinan Daerah Kota Sukabumi dan Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan mengemukakan bahwa:

“...Pemerintah Daerah melakukan pendataan ternyata dari kalangan generasi muda ternyata sebageian besar tidak ada yang mau jadi petani, sangat kecil sekali, mereka lebih berminat menjadi buruh, buruh pabrik, ya kerja-kerja kasar lah, karena menganggap jadi petani bukan sebuah profesi yang “baik” menurut mereka, sigana moal beunghar jadi petani, di sisi lain ada rasa gengsi, sangat kecil persentase anak muda mau bercocok tanam, makanya Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian memberikan semacam reward kepada anak muda yang mau jadi petani, anak muda yang cinta kebun..... lulusan IPB saja jarang yang mau jadi petani... serba dilematis..” Achmad Fahmi (Wakil Walikota Sukabumi)

Informasi yang lebih operasional untuk mempersiapkan generasi pertanian, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi menyampaikan:

“....upayaanya mengajak Dinas Pendidikan, memasukan di kurikulumnya atau di pelajarannya, saat bicara pertanian itu, adalah mengajak anak-anak bahwa ini adalah pekerjaan mata pencaharian yang luar biasa, petani ke depan bukan petani tradisional, tetapi jadi petani yang modern sebagai pengusaha pertanian, ini yang harus didukasi sejak dini.....”

Regenerasi di sektor pertanian khususnya di kawasan suburban Kota Sukabumi perlu lebih mengubah sebuah mindset berfikir kepada generasi mendatang bahwa pertanian merupakan sebuah mata pencaharian yang tidak hanya on-farm tetapi bisa menjadi usaha yang bergerak dari hulu ke hilir. Tentunya, sektor ini perlu dukungan yang kuat dari berbagai pihak khususnya komitmen politik dari pemerintah untuk keberpihakan kepada petani.

Pola Spasial Social Cohesion

Social cohesion (kohesi sosial) dipahami sebagai ukuran tingkatan hubungan sosial berdasarkan identitas, norma, nilai bersama. Dalam penelitian ini, secara kuantitatif kohesi sosial petani dicerminkan dengan banyaknya kelompok petani dan petani wanita yang aktif untuk memajukan pertanian. Dengan tanpa mereduksi pengertian kohesi sosial yang kompleks, data kuantitatif berdasarkan

institusi kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelompok tani wanita bisa merepresentasikan kerekatan antara sesama petani. Aktivitas petani di dalam kelompok, banyaknya kelompok tani dan kelompok tani wanita menandakan secara institusi telah terbentuk sebuah norma, nilai dan identitas yang disepakati di antara petani.

Hasil analisis klaster menunjukkan bahwa kecamatan Lembursitu dan Cibeureum memiliki tingkat kohesi yang lebih tinggi dibanding kecamatan Gunungpuyuh, Cikole, Warudoyong, Citamiang dan Baros. Hal ini bisa dipahami bahwa kecamatan-kecamatan yang termasuk klaster 1 merupakan wilayah dengan kawasan lahan terbangun lebih luas dan merupakan daerah proyeksi untuk kawasan terbangun khususnya permukiman dan pusat perekonomian.

Kohesi Sosial dalam Perspektif Kualitatif

Nilai-nilai ikatan sesama petani yang terbentuk dalam kelompok petani, gabungan kelompok petani dan kelompok wanita tani menunjukkan bahwa untuk kepentingan sosial masih terpelihara, namun kohesi sosial yang pada penggarapan lahan sawah sudah mulai luntur. Ikatan untuk saling membantu dalam penggarapan lahan telah diukur dengan uang. Hubungan antara pemilik/penguasa lahan dengan penggarap atau buruh tani cenderung diukur dengan uang. Sehingga, sakan beralih pada pola hubungan sewa. Buruh tani cenderung dibayar dengan uang saat selesai pekerjaan dan bantuan-bantuan untuk saling melengkapi penggarapan pada masing-masing lahan sudah mulai hilang. Sebagaimana dikemukakan oleh H. Mubarak (80 tahun) yang sebagai petani pemilik juga sebagai petani penggarap yang menggarapkan lagi lahan garapannya kepada penggarap lainnya. Hal ini hanya dilakukan oleh petani penggarap yang mendapatkan kepercayaan (trust) dan lahan garapan luas. Sebagaimana dikemukakan H. Mubarak (80 tahun).

“...anu Pak Tukiran oge 4 ha ku pak haji disewaan, ngan ku pak haji disebarkan supaya sarerea bisa makan.... naon margina karuya kanu aralit.....”

(“...Punya Pak Tukiran juga 4 ha oleh Pak haji (red: H. Mubarak) disewa, hanya saja disebar kepada penggarap lain agar semuanya bisa makan... karena kasihan kepada orang kecil...”)

Dikemukakan pula bahwa ia mendapatkan lahan luas tersebut atas dasar kepercayaan dari pemilik lahan. Pola kepercayaan ini sepertinya tidak menguntungkan penggarap kedua karena akan menyisihkan untuk sewanya. Hanya saja H. Mubarak menegaskan bahwa ia tidak pula mengambil keuntungan dari penggarap kedua, yang terpenting ia bisa menutupi kewajiban sewa kepada pemilik lahan. Gejala lain yang mendorong perubahan pola relasi agraria pada kawasan suburban pada lahan sawah adalah meningkatnya penguasaan dan pemilikan lahan oleh orang-orang dari luar kota/luar wilayah setempat (lahan guntai/absentee). Pola sewa yang diterapkan memicu resiko yang harus ditanggung petani penggarap lebih berat ketimbang pemilik lahan. Namun demikian, informasi di lapangan diperoleh bahwa ternyata pola sewa justru lebih disenangi oleh para petani penggarap. H. Mubarak (80 tahun) menyatakan:

“.....bebas ku nyewa, arek dikebonan, arek dipelakan nanaon bebas. Ari bagi hasil mah kudu kasaksian kumu gaduh serang, bisi jadi fitnah, ari nyewa mah henteu,

ngan resiko ditanggung pak haji, arek gagal henteuna mah.. raos keneh sewa daripada bagi hasil mah, moal aya fitnah.”

“.....bebas dengan sewa, mau dikelola untuk kebun, mau ditanami apapun bebas. Kalau menggunakan bagi hasil harus disaksikan oleh pemilik lahan, takutnya menjadi fitnah. Kalau dengan sewa itu tidak terjadi. Hanya saja resiko ditanggung Pak haji, gagal atau tidaknya. Lebih nyaman dengan sewa dari pada bagi hasil. Tidak ada fitnah”.

Alasan lain yang diperoleh dari Ibu Lilih (56 tahun) bahwa dengan sewa selain kebebasan untuk menggarap juga ada kebebasan saat menguasai lahan tersebut ketika peralihan musim tanam (masa bera) yang dimanfaatkan oleh petani.

“....usum halodo ngebon sa kotak, ukur narima hasil tina nyawah, mayar kanu nyewakeun mah sausum sakali panen wae”.

“...musim kemarau bisa dimanfaatkan satu kotak untuk berkebun, pemilik lahan hanya mendapatkan dari hasil sewa sawah, dibayarkan kepada pemilik hanya satu musim satu kali panen saja”.

Kebebasan dalam sistem sewa juga dapat dimanfaatkan dengan berkebun/tumpang sari dengan membudidayakan ikan menjadi penghasilan tambahan petani. H. Mubarak mengatakan bahwa dengan memanfaatkan lahan sawah dengan memelihara ikan juga mampu untuk mengatasi pembiayaan pembelian pupuk.

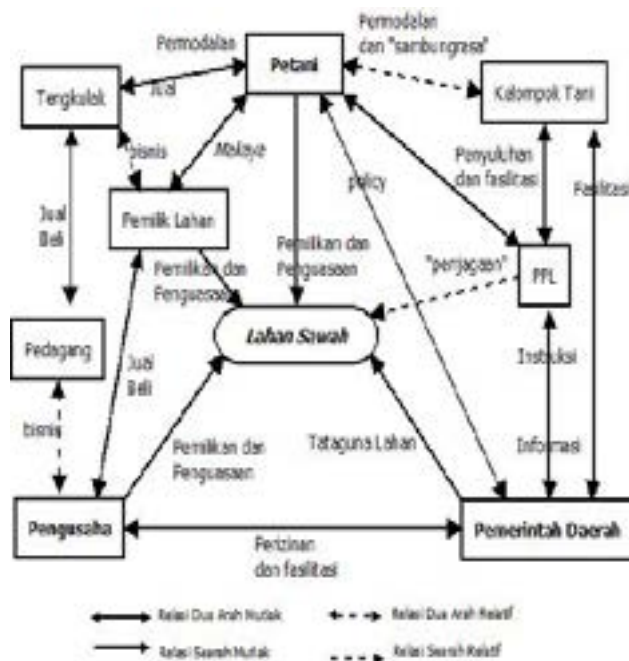
Namun demikian, penyewa tidak harus menanggung seluruh resiko, pajak tanah menjadi tanggung jawab pemilik. Kondisi hasil usaha tani juga diperhatikan oleh pemilik lahan. Jika terjadi gagal panen, pemilik dan penyewa dengan komunikasi tertentu bisa negosiasi ulang mengenai besaran sewa lahan. Sewa lahan biasanya disesuaikan dengan besaran hasil panen, namun secara pasti besaran sewa berkisar 20 – 30 kg gabah per are per musim. Besaran ini pula tergantung pada produktivitas lahan. Hal ini sebagaimana dikemukakan Pak Herman Kosasih (63 tahun) bahwa sewa yang dibayarkannya sebanyak 6 kwintal gabah untuk luas lahan 18 are. Selain itu, Pak Deden (57 tahun) menyatakan bahwa sewa untuk lahan garapannya disepakati 25 kg per are. Pola ini oleh petani penggarap dianggap masuk akal sebagaimana dikemukakan ibu Lilih bahwa maro tidak masuk akal bagi petani penggarap, petani penggarap menganggap pembagian itu terlalu besar untuk pemilik lahan.

Hasil penelitian, menunjukkan kondisi yang sedikit tidak selaras dengan hasil penelitian Wiradi dan Makali (2009) bahwa sistem sewa dengan pembayaran setelah panen hanya terjadi antara saudara atau antara pemilik tanah yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan penyewa dan bahwa kebiasaan sewa menyewa ada kaitannya dengan kebiasaan para pamong desa setempat yang selalu menyewakan tanah bengkoknya. Fenomena berbeda ini dimungkinkan karena beberapa faktor yaitu; pola pemilikan absentee, tingkat kepercayaan antara pemilik lahan dengan penggarap dengan mekanisme penyakapan/bagi hasil yang mulai menudar namun disisi lain kepercayaan pemilik meningkat karena lahan disewakan bukan kepada keluarga atau kerabat sebagaimana diperoleh oleh Wiradi dan Makali (2009), serta pola ke-praktis-an dalam hubungan

makaya antara pemilik-penggarap.

Peta Relasi Agraria

Peta relasi antarsubyek agraria terhadap lahan sawah di Kota Sukabumi secara sederhana dapat dilihat pada Gambar 2. Peta relasi tersebut masih menyimpan kompleksitas yang tidak secara terang benderang dapat terungkap. Peta relasi ini merupakan gambaran yang terpetakan berdasarkan hasil wawancara dan observasi.



Gambar 2. Relasi Agraria

Petani adalah subyek agraria yang memiliki relasi terbanyak dibanding dengan yang lainnya. Relasi petani dibangun dengan pemerintah daerah, tengkulak, kelompok tani, pemilik lahan dan tentunya dengan lahan sawah. Pola relasi petani dengan tengkulak membangun sebuah "simbiosis mutualisme". Saling berinteraksi, namun posisi petani akan menjadi inferior ketika berhadapan dengan tengkulak. Permodalan yang diberikan tengkulak untuk modal awal petani yang digunakan untuk membeli pupuk, benih atau biaya operasional lainnya menyebabkan petani "terikat" dengan tengkulak. Keberadaan tengkulak juga menjadi hal yang memudahkan bagi beberapa kalangan petani. Ibu Lilih menyampaikan bahwa:

“.... Kang Ibing, (tengulak) pare ma haji geus asak di girang, hegae kilo we.. dongkap tos beres kening sakitu kilo tah hargaana sakeieu, nuhun. Atos we.. teu aya istilah boa teuing ngabohong, tara sugan ditungkulan nimbang....”.

“..... Kang Ibing, padi ma haji sudah matang, silakan untuk ditimbang, begitu datang sudah selesai, mendapatkan padi sekian kilo dan harganya sekian, terima kasih. Selesai. Tidak ada istilah apakah Kang Ibing berbohong, tidak pernah disaksikan untuk menimbang....”.

Selain itu, tengkulak memberikan informasi mengenai

harga jual gabah, namun demikian masih terdapat ruang untuk dilakukan negosiasi harga, sekalipun petani telah mendapatkan pinjaman modal untuk masa tanam sebelumnya.

Pada sisi lain, sebenarnya mengenai permodalan jika berjalan secara optimal dan dikelola secara baik, kelompok tani bisa memberikan fasilitasi tersebut. Relasi yang dibangun pemerintah daerah dengan kelompok tani untuk memberikan dana bergulir kepada petani bisa diberdayakan dan dimanfaatkan oleh petani. Kecenderungan kegagalan pola relasi permodalan antara petani dengan kelompok tani berdasarkan temuan di lapangan yaitu: pertama, pola manajemen yang dikelola kelompok tani dengan lembaga keuangan mikro (LKM)-nya belum sepenuhnya maksimal, masih terdapat beberapa kekeliruan dan penyimpangan yang dilakukan oleh pengurus. Kedua, faktor petani yang mendapatkan pinjaman cenderung berpikiran bahwa dana yang diberikan dari pemerintah adalah dana hibah bukan tujuan bergulir serta pola penggunaan dana pinjaman dengan pola konsumtif bukan untuk tujuan produktif. Akibatnya, dana persediaan pada kas LKM semakin menipis.

Hubungan lahan sawah dengan petani adalah abadi, namun dalam perkembangannya, di dalam struktur agraria terdapat subyek agraria yang juga bersama-sama menggunakan dan memanfaatkan lahan secara berbeda. Relasi pengusaha/swasta terhadap lahan cenderung berbeda dengan petani. Kehadiran pemilik lahan yang tidak pro petani akan dengan mudah untuk melepaskan lahan miliknya kepada pengusaha tersebut. Kepentingan pengusaha adalah berorientasi pada aspek ekonomi yang secara sadar dan langsung akan terjadi konversi lahan sawah. Hal ini juga ditopang dengan mekanisme perizinan dan tata guna lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Perizinan dan fasilitasi pemerintah daerah berdasarkan regulasi tata guna lahan bisa menjadi kendali untuk lahan sawah agar bisa dipertahankan atau bisa pula terkonversi.

Pola Spasial Social Inclusion

Social inclusion didasarkan pada pengertian bahwa inclusion and equal opportunities in institutions, health service coverage dan inclusion in community services (Beck et al 2001). Dengan demikian, dapat dipahami bahwa social inclusion merupakan kesetaraan dalam mengakses suatu kelembagaan. Kelembagaan para petani lahan sawah secara fisik tidak terlepas dari sistem irigasi, kedekatan dengan sumber air, cakupan pelayanan kesehatan dan dekatnya dengan pusat kota sebagai bentuk inclusion in community services.

Pola spasial social inclusion ini akan memetakan wilayah-wilayah yang diukur dengan sistem irigasi, jarak rata-rata lahan sawah ke sungai, jarak ke pusat kota dan jarak ke pusat pelayanan kesehatan dan rumah sakit.

Pada klaster 1 memungkinkan lahan sawah tetap dipertahankan mengingat secara rata-rata lebih dekat dengan jaringan irigasi dan sungai sebagai sumber air. Kecamatan yang termasuk ke dalam klaster 2 sawahnya cenderung akan lebih mudah beralih fungsi. Rustiadi dan Wafda (2005) berpendapat bahwa pada daerah-daerah seputar perkotaan ekspansi aktivitas urban (suburbanisasi) merupakan faktor utama terjadi alih fungsi lahan-lahan pertanian ke aktivitas urban. Sebagian besar magnitude

proses alih fungsi lahan berlangsung di kawasan-kawasan perbatasan kota-desa dan perbatasan kawasan budidaya-nonbudidaya.

Grafik dan peta social inclusion sebagaimana terlihat pada lampiran menunjukkan bahwa klaster 1 yang terdiri atas Kecamatan Lembursitu dan Baros memiliki tingkat infrastruktur pertanian yang memungkinkan untuk diberlakukan keberlanjutan budidaya pertanian dibanding dengan 5 kecamatan yang lain. Berkaitan dengan pelayanan pemerintah untuk memberikan pelayanan infrastruktur pertanian, Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan menyampaikan:

“...yang berkaitan dengan irigasi kita tentunya selalu memfasilitasi irigasi mana yang dipelihara atau diperbaiki, tetap datanya dari kita., kita informasikan ke Dinas PU. Hanya saja informasi dan data ini bukan tidak cepat ditanggapi tapi keterbatasan anggaran, namun dalam 2 tahun terakhir ini anggarannya naik untuk rehap dan pembangunan...”

Dilanjutkannya bahwa pemeliharaan jaringan irigasi dan infrastruktur lainnya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah namun ia berharap terdapat peran serta dari masyarakat luas sebagaimana disampaikan:

“Pemeliharaan irigasi juga berkaitan dengan perilaku, membuang sampah dan detergen juga yang mempengaruhi menurunkan produktivitas dan untuk dikonsumsi juga tidak bagus... jadi harus saling tidak hanya dari sisi memelihara irigasi juga perilaku masyarakatnya untuk menjaga tidak membuang sampah. Tidak membuang kotoran ataupun sisa-sisa rumah tangganya, jadi permasalahannya tidak sesederhana.. fisik diperbaiki juga sisi perilaku....”

Tabel 4. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Kota Sukabumi Tahun 2012

Lapangan Usaha	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Pertanian	3.87	4.2	3.97
Industri Pengolahan	9.42	17.22	11.81
Perdagangan, Hotel dan Restoran	34.19	44.84	37.45
Jasa-jasa	20.44	25.63	22.03
Lainnya	32.08	8.11	24.74

Sumber: Hasil Sakernas 2012 dalam Bappeda dan BPS Kota Sukabumi, 2012

Dengan demikian, social inclusion sebagai salah satu hak warga negara dengan cara pemerintah menyediakannya, tentunya tidak hanya pemerintah yang menyediakan tetapi juga peran aktif dan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaannya sangat diperlukan.

Pola Spasial Social Empowerment

Van der Maesen dan Walker (2005) menyatakan bahwa social empowerment merupakan the capability to interact. Dengan demikian, social empowerment dapat dipahami untuk mengetahui tingkatan kapasitas secara personal dari seseorang dan kemampuan mereka untuk berinteraksi guna meningkatkan hubungan sosial. Kemampuan dalam konteks ini adalah kemampuan petani untuk bisa berdaya dalam penyediaan kebutuhan pokoknya dalam berusaha tani. Indikator untuk mengukur social empowerment ini terdiri atas kemampuan petani untuk menyediakan bibit, memenuhi kebutuhan pupuk, upaya mengendalikan hama dan tingkat kemampuan untuk membayar ongkos tenaga kerja.

Berdasarkan hasil analisis ini dapat diketahui bahwa rata-rata social empowerment pada setiap kecamatan memiliki karakteristik yang sedikit berbeda. Secara konsisten korelasi selalu berbanding terbalik. Ketika ongkos tenaga kerja rata-rata tinggi, namun pengeluaran untuk bibit rendah. Kondisi ini berbanding terbalik pada ongkos tenaga kerja yang rendah dengan pengeluaran untuk bibit atau penanggulangan hama yang tinggi.

Klaster 2 yang terdiri atas Kecamatan Warudoyong, Citamiang dan Baros merupakan kecamatan yang memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan klaster 1. Hal ini menandakan tingkat social empowerment Warudoyong, Citamiang dan Baros lebih tinggi dibandingkan dengan Cikole, Cibereum, Lembursitu dan Gunungpuyuh.

Rasio Lahan dan Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan dalam konteks ini diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan penduduk Kota sukabumi sebagai sumber mata pencaharian utama bagi keluarga. Berdasarkan Tabel 4. Pada tahun 2012, sektor usaha di Kota Sukabumi yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dengan komposisi penyerapan sebesar 37.45 persen.

Komposisi penduduk perempuan yang bekerja pada sektor ini lebih besar dibandingkan dengan komposisi penduduk laki-laki, yakni 44.84 persen berbanding 34.19 persen. Sektor jasa-jasa dan industri pengolahan juga cukup banyak menyerap tenaga kerja, yakni masing-masing sebesar 22.03 persen dan 11.81 persen. Sementara itu, sektor pertanian hanya menyerap sekitar 3.97 persen tenaga kerja. Indikasi lain yang terjadi pada pola penyerapan tenaga kerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran ini adalah adanya kemajuan ekonomi yang mengarah kepada peningkatan produktivitas tenaga kerja. Hal ini dimungkinkan karena mereka yang bekerja di sektor perdagangan, hotel dan restoran cenderung memiliki tingkat produktivitas yang relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan mereka yang bekerja pada sektor pertanian. Temuan informasi di lapangan bahwa kurang berminatnya tenaga kerja terhadap sektor pertanian dikemukakan oleh Cece (63 tahun) dan Wawan (42 tahun) sebagai berikut:

“.....tenaga kerja dari generasi muda dari pada tani mendingan jadi supir angkot...” (Cece, 63 tahun)

“.....kikiran tenaga kerja margi teu minat kana pertanian, seuseurna ka pabrik-pabrik...” (Wawan, 42 tahun).

“.....kekurangan tenaga kerja karena tidak berminat pada sektor pertanian, lebih banyak (bekerja) di pabrik-pabrik....”.

Kekurangan tenaga kerja dikarenakan faktor kurang minatnya generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian. Permasalahan ini menjadi penyebab pula beralihnya kepemilikan dan terfragmentasinya lahan sawah di Kota Sukabumi. Selain itu, penguasaan dan pengusahaan lahan yang semakin sempit, sebagai akibat dari meningkatnya konversi lahan, pewarisan, dan penguasaan oleh orang luar daerah (guntai) menjadi permasalahan pertanian yang dihadapkan pada masalah tenaga kerja.

Tabel 5. Komposisi Luas Lahan Sawah dengan Rumah

Kecamatan	Luas Lahan Sawah (ha)	RTUP Pengguna Lahan		Petani Gurem	Jumlah RTUP Per Hektar Sawah	Luas rata-rata Penguasaan Lahan Sawah (ha)
		Jumlah				
		Jumlah	%			
Baros	244.92	913	774	84.78	3.73	0.27
Lembursitu	355.59	1723	1452	84.27	4.85	0.21
Cibereum	485.5	1199	889	74.15	2.47	0.4
Citamiang	63.22	323	283	87.62	5.11	0.2
Warudoyong	242.05	690	503	72.9	2.85	0.35
Gunungpuyuh	81.32	383	312	81.46	4.71	0.21
Cikole	83.94	370	308	83.24	4.41	0.23
Jumlah	1556.54	5,601	4,521	80.72		

Sumber: BPS Kota Sukabumi, 2014 (diolah)

Tabel 5 menunjukkan rata-rata luasan lahan sawah per rumah tangga usaha pertanian paling tinggi hanya 0.40 ha dan terendah hanya 0.20 ha. Dalam perhitungan usaha pertanian dan syarat minimal penguasaan lahan yang cukup seharusnya tidak kurang dari 0.5 ha. Petani gurem tercatat paling tidak 72.90 persen masih ada di Kota Sukabumi sehingga faktor ini pula yang menyebabkan sektor pertanian tidak menjadikan jaminan untuk kesejahteraan.

Pertanian yang hanya berparadigma on-farm saja harus diperbaiki. Pengelolaan sumber daya agraria harus bekerja dan dilaksanakan dari hulu sampai hilir. Artinya, petani tidak hanya menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor pertanian yang menjual hasil pertanian secara bahan bakutetapi harus out of the box dan mencoba menjalankan agribisnis yang bisa mengolah dan menjual komoditas hasil pertanian. Kepala Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi menyikapi ini menyatakan:

“.....Kita dulu yang dilatih, penyuluhnya dilatih untuk agribisnis. Bicaranya tentang pengolahan, petaninya dilibatkan dalam pelatihan agribisnis itu, kemudian setiap ada aktivitas atau event-event yang dilakukan baik itu pemasaran petani selalu dilibatkan, ikut langsung, jadi biar mereka tahu bahwa kalau di on farm

saja penghasilannya x rupiah, tapi kalau misalnya dia bisa memproduksi lebih dan mem-packaging-nya dan memasarkan itu, maka hasilnya 2-3 kali lebih besar dari pada di on farm saja, yang penting mindset dan nilainya...”

Pelatihan untuk beranjak dari hanya on farm tetapi bergerak ke agribisnis akan memberikan masukan yang cukup untuk meningkatkan pendapatan petani. Berikut keterangan dari Cece (63 tahun).

“.....kumaha lamun jang produksi ku saya dibere 700 kg untuk biaya resiko berupa ketan tapi ieu ketan tong dijual, mau dijual silahkan 7 x 3 dua juta saratus tah cukup moal samusimeun? .. ayeuna kumaha lamun diproduksi?.. urang melak ketan ulah ngajual ketan, tapi melak ketan ngajual ranginang. Ayeuna kieu tehnikna. 7 kwintal diolah, kebutuhan sehari sabaraha? Misalkeun 10 leter. Lamun beli ti tangkulak sabaraha hargana, 10 ribu per leter umpama, tapi urang boga ketan kita olah sendiri, biasana urang ngajual ka tangkulak, ku tangkulak dipoekeun, dijual ka pasar, dibeuli ku urang, tangkulak ngajual ka tangkulak beas, tangkulak beas ngajual ka urang, tah batina aya 3 poin berarti urang teu ka bobodo, jadi lamun urang ngaporduksi hhasil pertanian sendiri berarti 2 item tangkulak jeung tukang besa, batina dicokot ku urang. lamun ngolah sadeka berarti 100 ribu sehari ambil 50 ribu jang tabungan jeung tah 50 ribu jang resiko jeung barudak... dicoba kita kerjakan.. alhamdulillah berjalan....”

“.....Bagaimana jika untuk produksi saya beri 700 kg untuk biaya resiko berupa ketan, tapi ketan ini jangan dijual, jika ingin dijual silahkan 7 x 3 dua juta seratus, nah apakah cukup untuk membiayai dalam satu musim?... sekarang bagaiman jika diproduksi?.. Kita menanam ketan jangan menjual ketan, tetapi menanam ketan menjual ranginang. Sekarang begini teknisnya. 7 kwintal diolah lalu kebutuhan sehari berapa? Misalkan 10 liter, jika membeli dari tengkulak berapa harganya, 10 ribu per liter misalnya. Tetapi kita punya ketan untuk kita olah sendiri. Biasanya kita menjual kepada tengkulak, lalu tengkulak menjemur, dijual ke pasar, dibeli lagi oleh kita.. tengkulak menjual ke tengkulak beras, tengkulak beras menjual kepada kita. Nah untungnya ada 3 poin berarti kita tidak bisa dibodohi, jadi jika kita memproduksi hasil pertanian sendiri berarti 2 item tengkulak dan pedagang beras, untungnya kita ambil. Jika mengolah sadeka (10 liter) berarti 100 ribu sehari, ambil 50 ribu untuk menabung dan 50 ribu untuk resiko dapur dan anak-anak... Dicoba kita kerjakan.. Alhamdulillah berjalan.....”

Empowerment (pemberdayaan) petani dilihat dari aspek bagaimana petani tersebut bisa mengelola lahan dan panen dengan hasil yang luar biasa, serta keberdayaan tersebut bisa diukur dengan kegiatan off farm yang bisa menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Oleh karena itu, perspektif pertanian yang bekerja dari hulu sampai hilir, dari ladang sampai pasar atau agribisnis perlu terus digalakan dan menjadi mindset para petani di Indonesia dan di Kota Sukabumi khususnya.

Pola Spasial Social Quality

Gambaran social quality petani lahan sawah di Kota

Sukabumi dalam analisis ini menggunakan empat pendekatan konfigurasi, yaitu konfigurasi socio-economic security, konfigurasi social cohesion, konfigurasi social inclusion dan konfigurasi social empowerment. Sebaran social quality menggunakan analisis gerombol. Pengelompokan dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik dan kelompok wilayah yang memiliki kemiripan karakteristik untuk dijadikan prioritas wilayah yang dilindungi berdasarkan kondisi social quality petani lahan sawah. Selanjutnya dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan penataan ruang dan strategi perlindungan lahan sawah.

Setiap data variabel yang telah distandardisasi selanjutnya digerombolkan dengan analisis gerombol. Nilai ini digunakan untuk mengukur kemiripan nilai variabel antar kecamatan dengan menggunakan jarak Euclid. Metode yang digunakan di dalam penggerombolan adalah pautan nilai rata-rata dari data terstandardisasi. Variabel yang signifikansi yang menjadi penanda sehingga mampu membedakan karakteristik kluster yaitu pembiayaan, pemilik lahan, penyakap, buruh tani dan kelompok tani. Dengan demikian, sejalan dengan keterangan Herman Kosasih (63 tahun) bahwa

“...yang utama tenaga kerja, generasi penerus tidak ada, orang tua tukang tani, anaknya belum tentu mau, anaknya mah ka pabrik we dan kalau dulu sering ada tenaga bantuan dari jampang dan sagaranten, sekarang mah di sana juga sulit...”

Pemecahan lahan pada kawasan suburban bisa terjadi melalui sistem pewarisan. Fragmentasi ini terjadi karena anak-anak petani (pewaris) tidak berminat untuk menjadi petani seperti orang tuanya. Herman Kosasih mengatakan:

“...generasi penerus tidak mau turun ke sawah, dijual sawahnya.... begitu orang tuanya meninggal, dan anaknya tidak mengenal pertanian akhirnya dijual lahan tersebut....”

Tantangan yang dihadapi oleh pertanian suburban khususnya di Kota Sukabumi, selain konversi lahan yang masif karena faktor kebijakan, konversi lahan juga disebabkan oleh semakin kurangnya tenaga kerja pertanian.

Pengelompokan dengan membentuk tipologi wilayah secara agregat membentuk social quality pada masing-masing wilayah. Tipologi wilayah tersebut terbagi menjadi tipologi wilayah dipertahankan sebagai prioritas utama suatu kecamatan yang akan dipertahankan lahan sawahnya berdasarkan kondisi sosio-agraria petaninya, dan tipologi wilayah dapat dikonversi sebagai lahan yang dimungkinkan dikonversi. Prosedur tersebut menghasilkan 2 gerombol masing-masing terdiri atas 5 wilayah dan 2 wilayah. Pemotongan pada jarak tersebut tidak menghasilkan gerombol dengan anggota yang sama

Tipologi wilayah secara social quality secara agregat menghasilkan kluster 1 yang terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Cikole, Gunungpuyuh, Warudoyong, Citamiang dan Baros, sedangkan kluster 2 terdiri atas 2 kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu dan Cibereum. Kluster 2 sebagai hasil analisis penggerombolan termasuk kategori wilayah yang dipertahankan atau prioritas utama lahan sawah dan keberadaan petani secara social quality-nya tetap dipertahankan.

Dengan memperhatikan hasil analisis ragam, clustering tipologi wilayah dan hasil wawancara terhadap informan tentang kondisi social quality petani lahan sawah, dapat diketahui bahwa permasalahan tenaga kerja merupakan permasalahan yang serius dalam mempertahankan lahan sawah di perkotaan. Merujuk pada Undang-undang 41 tahun 2009 bahwa tenaga kerja menjadi salah satu komponen yang membantu dalam rangka mengelola lahan dan agroekosistem dalam mewujudkan pertanian pangan. Dengan demikian, wilayah yang masih memungkinkan bertahan dan bisa dipertahankan adalah wilayah Kecamatan Cibereum dan Kecamatan Lembursitu. Namun demikian, wilayah lainnya yang masih memiliki lahan sawah tidak menutup kemungkinan untuk bisa dipertahankan dengan catatan karakteristik pada wilayah tersebut bisa sama atau bisa mendekati dengan Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Cibereum terutama dalam hal ketenagakerjaan pada lahan pertanian.

Kesimpulan

Pola spasial Social Quality petani lahan sawah bertujuan untuk memetakan kondisi petani dengan mengelompokkan kecamatan yang memiliki kemiripan karakteristik petani yang sama. Secara socio-economic security, variabel biaya per hektar per musim, pemilik lahan, hubungan sapa-menyakap, buruh tani dan petani gurem merupakan variabel pembeda yang mengelompokkan petani pada 2 kelompok kecamatan. Secara tipologi wilayah pengelompokan kecamatan terdiri dari 2 kelompok. Klaster 2 terdiri atas Kecamatan Cikole, Gunungpuyuh, Warudoyong, Citamiang dan Baros dengan nilai rata-rata 0.708. Klaster 1 terdiri atas Kecamatan Lembursitu dan Cibereum dengan nilai rata-rata 0.742. Petani pada klaster 1 secara socio-economic security dimungkinkan untuk bisa mempertahankan lahan sawah.

Relasi sosial kelompok petani untuk mempertahankan socio-economic security terbentuk enam jenis komunitas petani, yaitu: (1) petani pemilik, (2) petani pemilik juga penggarap, (3) petani pemilik merangkap pengumpul (tengkulak), (4) petani penggarap (5) petani penggarap juga buruh tani, dan (6) buruh tani.

Untuk mengukur tingkat kohesivitas di kalangan petani, dipergunakan pendekatan keorganisasian yang secara langsung membentuk kelembagaan di dalam yang mengandung norma, kepercayaan dan nilai. Tingkat kohesi sosial diukur dengan jumlah kelompok tani, gabungan kelompok tani dan kelompok wanita tani pada setiap kecamatan. Hasil analisis klaster social cohesion petani lahan menunjukan bahwa kecamatan Lembursitu dan Cibereum memiliki tingkat kohesi yang lebih tinggi dibanding kecamatan Gunungpuyuh, Cikole, Warudoyong, Citamiang dan Baros. Faktor penyebabnya adalah kecamatan Gunungpuyuh, Cikole, Warudoyong, Citamiang dan Baros merupakan daerah proyeksi untuk kawasan terbangun khususnya permukiman dan pusat perekonomian yang berbanding terbalik Kecamatan Lembursitu dan Kecamatan Cibereum yang masih memiliki hamparan sawah yang luas dan diproyeksikan sebagai pusat lahan pertanian. Namun demikian, ikatan sosial tanpa pamrih sudah mulai luntur. Mekanisme organisasi berjalan secara mekanistik dan setiap hubungan saling membantu dalam penggarapan lahan diukur dengan uang. Sistem sapa/makaya telah beralih dari bagi hasil menjadi sewa. Ikatan sosial agraria yang berkembang memunculkan subyek-

subyek sosial lainnya yang berkepentingan dengan lahan sawah, sehingga menimbulkan kompleksitas relasi agraria yang ada pada lahan sawah di Kota Sukabumi. Kompleksitas relasi agraria salah satunya terlihat dari peran tengkulak yang memberikan bantuan permodalan yang menimbulkan tatanan dan nilai tertentu yang baru dalam relasi agraria. Tatanan ini disebabkan tidak maksimalnya mekanisme bantuan permodalan yang telah disalurkan melalui LKM.

Pola spasial mengenai social inclusion tercermin dari tingkat infrastruktur pertanian yang memadai untuk diberlakukan keberlanjutan lahan sawah berada di kecamatan Lembursitu dan Baros. Keterpeliharaan jaringan irigasi menjadi infrastruktur yang vital untuk pertanian lahan sawah. Pihak pemerintah daerah selalu mengingatkan bahwa pemeliharaan irigasi berkaitan dengan perilaku. Perilaku masyarakat untuk menjaga jaringan irigasi harus bersinergi dengan pemeliharaan jaringan irigasi oleh pemerintah.

Pola spasial social empowerment menghasilkan pengelompokan pada Klaster 2 terdiri atas Kecamatan Warudoyong, Citamiang dan Baros merupakan kecamatan yang memiliki nilai rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan klaster 1 yang terdiri atas Kecamatan Cikole, Gunungpuyuh, Lembursitu dan Cibereum. Ketenagakerjaan pada sektor pertanian khususnya pada pertanian lahan sawah menjadi permasalahan tersendiri di Kota Sukabumi. Keberminat generasi muda cenderung pada sektor pekerjaan nonpertanian. Dengan demikian, perlu strategi yang baik untuk mempertahankan lahan sawah dalam perspektif tenaga kerja. Kemampuan petani dan regenerasi petani harus menjadi fokus perhatian pembangunan pertanian di Kota Sukabumi. Terlebih lagi peningkatan kapasitas petani yang tidak hanya onfarm harus menjadi agenda yang terencana.

Pengelompokan kecamatan secara agregat untuk mengukur social quality petani lahan sawah diperoleh hasil bahwa klaster 1 terdiri atas 5 kecamatan yaitu Kecamatan Cikole, Gunungpuyuh, Warudoyong, Citamiang dan Baros, sedangkan klaster 2 terdiri atas 2 kecamatan yaitu Kecamatan Lembursitu dan Cibereum. Klaster 2 sebagai hasil analisis penggerombolan sebagai kategori wilayah yang dipertahankan atau prioritas utama lahan sawah dan keberadaan petaninya tetap dipertahankan. Rata-rata agregat social quality pada klaster 2 lebih tinggi dibandingkan dengan klaster 1. Namun demikian, tenaga kerja masih menjadi permasalahan pokok yang masih perlu solusinya.

Arahan strategi perlindungan lahan sawah dapat dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan kapasitas agribisnis petani sehingga usaha tani berkembang pada lahan sawah.
2. Menyusun rencana aksi untuk menanamkan mindset kepada generasi muda tentang pentingnya petani dan pertanian.
3. Mengendalikan perizinan dengan terlebih dahulu merevisi RTRW yang tidak abai terhadap eksistensi lahan sawah dan petani.
4. Pembelian lahan-lahan sawah produktif oleh pemerintah daerah dan dijadikan sebagai kawasan strategis pertanian di perkotaan.

Disarankan Penelitian lebih lanjut mengenai Kota Sukabumi sebagai Agropolis dan feasibility study mengenai kawasan Strategis Agroedutourism di Kota Sukabumi.

Daftar Pustaka

- Anonymous. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Jakarta (ID).
- Beck W, van der Maesen LJG, Walker A. 2001. Theorizing Social Quality: The Concept's Validity. *Social Quality. A Vision for Europe* The Hague, Kluwer International (NL): pp 307-360
- [BPS Jawa Barat]. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. 2012. Jawa Barat Dalam Angka. Bandung (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS Kota Sukabumi]. Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi. 2013. Kota Sukabumi Dalam Angka. Kota Sukabumi (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS Kota Sukabumi]. Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi. 2012. Kota Sukabumi Dalam Angka. Kota Sukabumi (ID): Badan Pusat Statistik.
- [BPS Kota Sukabumi]. Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi. 2014. Potret Usaha Pertanian Kota Sukabumi Menurut Subsektor (Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013). Kota Sukabumi (ID): Badan Pusat Statistik.
- [Bappeda dan BPS Kota Sukabumi]. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pusat Statistik Kota Sukabumi. 2013. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Sukabumi 2012. Kota Sukabumi (ID): Badan Pusat Statistik.
- Creswell JW. 2010. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta (ID): Pustaka Pelajar.
- [DPPKP dan PSP3 IPB]. Dinas Pertanian, Perikanan dan Ketahanan Pangan Kota Sukabumi dan Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Institut Pertanian Bogor. 2013. Laporan Akhir Kajian Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Kota Sukabumi. Bogor (ID): Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM IPB.
- Nasoetion LI. 2003. Konversi Lahan Pertanian: Aspek Hukum dan Implementasinya. *Prosiding Seminar Nasional Multifungsi dan Konversi Lahan Pertanian*. Penyunting: U. Kurnia, F. Agus, D. Setyorini, dan A. Setiyanto. Bogor (ID): Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat. Hal 41-55.
- Netting F, Kettner PM, Steven L. McMurtry. 1993. *Social Work Macro Practice*, New York (US). Longman.
- Panuju DR, Rustiadi E. 2012. Teknik Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah. *Penuntun Praktikum*. Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan Fakultas Pertanian. Bogor (ID): Institut Pertanian Bogor.
- Rudito B, Famiola M. 2008. *Social Mapping – Metode Pemetaan Sosial*. Bandung (ID): Rekayasa Sains.
- Rustiadi E, Wafda R. 2005. Masalah Ketersediaan Lahan dan Konversi Lahan Pertanian. dalam Sunito S et al. (ed). *Prosiding Seminar Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi*. Bogor (ID): Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM IPB. Halaman 70-85.
- Sihaloho M, Dharmawan AH, Rusli S. 2007. Konversi Lahan dan Perubahan Struktur Agraria (Studi Kasus di Kelurahan Mulyaharja, Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor Jawa Barat). Bogor (ID): Sodality: *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi dan Ekologi Manusia*. 01 (02):253-270.
- Sitorus MTF. 2002. *Lingkup Agraria*. Dalam Endang Suhendar dkk. *Menuju Keadilan Agraria: 70 Tahun Gunawan Wiradi*. Bandung (ID): Akatiga. Halaman 25-40.
- Sitorus MTF. 2005. Krisis Paradigma Pertanian: Masalah Konversi Lahan pertanian di Indonesia dari Sudut Pandang Sosiologi Agraria. Dalam Sunito S et al. (ed). *Prosiding Seminar Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi*. Bogor (ID): Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM IPB. Halaman 39-46.
- Soetarto E, Shohibuddin M. 2005. *Reforma Agraria: Prasyarat Utama Bagi Revitalisasi Pertanian dan Pedesaan*. Bandung (ID): Konsorsium Pembaruan Agraria.
- Tjondronegoro SMP. 1999. *Sosiologi Agraria: Kumpulan Tulisan Terpilih*. Bandung (ID): Yayasan Akatiga.
- Van der Maesen LJG, Walker A, Keizer M. 2005. "Social Quality" The Final Report. *European Network Indicators of Social Quality* (NL). European Foundation on Social Quality.
- Van der Maesen LJG, Walker A. 2005. *Indicators of Social Quality: Outcomes of the European Scientific Network* (NL). *European Journal Of Social Quality* 5 (1-2):8-24
- Walker A, van der Maesen LJG. 2003. *Social Quality and Quality Of Life Paper for ESPA-NET Conference*. Copenhagen (DK): pp13-15
- Winoto J. 2005. Kebijakan Pengendalian Alih Fungsi Tanah Pertanian dan Implementasinya. Dalam Sunito S et al. (ed). *Prosiding Seminar Penanganan Konversi Lahan dan Pencapaian Lahan Pertanian Abadi*. Bogor (ID): Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan LPPM IPB. Halaman 15-21
- Winoto J. 2007. "Reforma Agraria dan Keadilan Sosial". Orasi Kepala BPN-RI di Institut Pertanian Bogor. Bogor (ID): 1 September 2007.
- Wiradi G. 2000. *Reforma Agraria Perjalanan yang Belum*

Berakhir. Yogyakarta (ID): Insist Press, KPA dan Pustaka Pelajar.

Wiradi G.2009. Seluk beluk Masalah Agraria, Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. Penyunting: Moh. Sohibuddin. Yogyakarta (ID): STPN Press dan Sajogyo Institute.

Wiradi G, Makali. 2009. Penguasaan Tanah dan Kelembagaan dalam Ranah Studi Agraria: Penguasaan Tanah dan Hubungan Agraris. Editor: Moh. Shohibuddin. Yogyakarta (ID): Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Sajogyo Institute.

Lampiran: Peta Kluster Social Quality Petani Lahan Sawah di Kota Sukabumi

